

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Kondisi topografi Kabupaten Malang merupakan daerah dataran tinggi yang dikelilingi oleh beberapa gunung dan dataran rendah atau daerah lembah pada ketinggian 250-500meter diatas permukaan laut (dpl) yang terletak dibagian tengah pada wilayah Kabupaten Malang.
2. Permasalahan kinerja pengelolaan keuangan dan tingkat kemandirian pemerintah daerah kabupaten malang belum maksimal, sebagai bukti laporan realisasi anggaran pendapatan asli daerah lebih kecil dibandingkan dengan penerimaan dana transfer dari pemerintah pusat, penyebab permasalahan masih adanya keterbatasan sumber daya manusia dalam penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah serta pengelolaan keuangan daerah, hal ini mengakibatkan pembiayaan belanja operasi masih tergantung pada dana transfer pemerintah pusat karena pendapatan pemerintah daerah mengalami defisit.
3. Rasio kemandirian  
Nilai rasio kemandirian menghasilkan pola hubungan intruktif dimana peran pemerintah pusat lebih dominan dari pada kemandirian pemerintah daerah kabupaten malang atau pemerintah daerah belum mampu melaksanakan otonomi daerah. Pola kemandirian keuangan daerah

Kabupaten Malang masih tergolong dalam interval 0%-25% maka peranan pemerintah pusat lebih dominan daripada pemerintah daerah dapat digambarkan bahwa kemampuan dan kinerja daerah Kabupaten Malang dalam membiayai pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan suatu daerah masih sangat rendah masih sangat tergantung bantuan dari pemerintah pusat.

4. Rasio Efektivitas PAD dari tahun 2017-2020 berfluktuasi rasionya lebih besar dari 100% termasuk dalam kategori atau kriteria sangat efektif, karena nilai rasio efektifitas lebih dari 100% sebab realisasi pendapatan asli daerah lebih besar dibandingkan dengan target pendapatan asli daerah, maka pemerintah daerah sudah efektif dalam merealisasikan target penerimaan pendapatan asli daerah.
5. Rasio efisiensi dikatakan efisien karena realisasi belanja lebih kecil dibandingkan anggaran belanja, secara umum efisien di Pemerintah Daerah Kabupaten Malang tahun 2017-2021 sudah baik sebab realisasinya sudah dibawah 100%.
6. Rasio pertumbuhan dinilai dari total belanja tahunan lebih besar dibanding total belanja tetap dan nilai rasio rata-rata pertumbuhan sebesar 21% dari tahun 2017-2021 dikatakan sudah normal karena lebih dari 10%.

## **B. Saran**

1. Pemerintah Daerah Kabupaten Malang dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dari pendapatan pajak daerah, pendapatan retribusi daerah, dan pendapatan pengelolaan kekayaan daerah., serta pendapatan lain-lain

daerah, untuk mempertahankan suatu usaha yang dapat memberikan pemasukan dengan cara mensosialisasikan kepada masyarakat tentang pentingnya pembayaran pajak daerah untuk pembangunan daerah Kabupaten Malang khususnya.

2. Kabupaten Malang harus lebih efektif dan efisien dalam memperhatikan keserasian antara belanja operasional dengan pembangunan.
3. Pendapatan daerah masih bisa ditingkatkan pencapaian pendapatan asli daerah dengan lebih menggali potensi yang ada sehingga daerah tidak selalu bergantung pada pemerintahan pusat.
4. Memberi pelatihan kepada jajaran badan keuangan dan asset daerah yang mengelola keuangan dan pendapatan asli daerah dalam penyusunan anggaran dan pertanggungjawaban keuangan sehingga dapat mengoptimalkan kinerja pengelolaan keuangan dan tingkat kemandirian yang lebih efektif.

## DAFTAR PUSTAKA

- Albasiah, Oesi, Agustina. 2013. Analisis Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah dan Tingkat Kemandirian Daerah Di Era Otonomi Daerah: Studi Kasus Kota Malang (Tahun Anggaran 2007-2011). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB*. Vol 1 No 2 hal: 1-10. Dapat diakses melalui: <https://jimfeb.ub.ac.id/index.php/jimfeb/article/view/394>. Pada 3 Maret 2023.
- Awani, M. F., & Hariani, S. 2021. Analisa Rasio Kemandirian Daerah dan Rasio Keuangan Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. Vol 3 No 2, hal: 95-102. Dapat diakses melalui: <https://ejournal.imperiuminstitute.org/index.php/AKURASI/article/view/158> Pada 20 April 2023.
- Dwi Saraswati, Yunita Sari Rioni, S. 2019. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Ukuran Pemerintah Daerah, Leverage, Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal Akuntansi Bisnis & Publik*, Vol 9 No 2, Hal: 110-120. Dapat diakses melalui: <https://jurnal.pancabudi.ac.id/index.php/akuntansibisnisdanpublik/article/view/462> Pada 20 April 2023.
- Enceng, P. M.W. 2008. Kajian Terhadap Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Studi Kasus di Kabupaten Purworejo). *Jurnal Ekonomi* (Mei). Vol. 13 No. 1. Dapat diakses melalui: <https://ejournal.uksw.edu/jeb/article/download/238/216> pada Tanggal 3 Maret 2023.
- Ahmad Faisal, Rande Samben, Salamah Pattisahusiwa 2017. Analisis kinerja Keuangan. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB*. vol 14 No 1, Hal: 6-15. Dapat diakses melalui: <https://www.researchgate.net/publication/322694360> Analisis kinerja keuangan. Pada 3 Maret 2023.
- Hutajulu Haloman 2014. Analisis Penelolaan Keuangan Daerah Di ota JayaPura Pada Era Otonomi Khusus. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Mahasiswa FEB*. Vol. 17 No. 1. Dapat diakses melalui: <https://ejournal.uksw.edu/jeb/article/view/238> pada 18 Mei 2023
- Halim, Abdul. 2012. Akuntansi Sektor Publik, Akuntansi Keuangan Daerah. Edisi 4. Penerbit Salemba Empat: Jakarta. <https://opac.perpusnas.go.id/DetailOpac.aspx?id=599540> pada 22 April 2023
- Harjito, Y., Nugraha, P. S., & Yulianto, Y. 2020. Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten dan Kota Di Indonesia. *Jae (Jurnal Akuntansi Dan Eknomi)*, Vol 5 No 1, Hal: 19-28. <https://doi.org/10.29407/jae.v5il.14061> Pada 1 april 2023.
- Mahmudi. 2019. Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Yogyakarta: STIM YKPN. <https://ejournal.ipdn.ac.id/JEKP/article/download/2806/1381/>
- Mahmudi. 2019. Manajemen Kinerja Sektor Publik. Edisi Ketiga. Penerbit Sekolah <https://ejournal.ipdn.ac.id/JEKP/article/download/2806/1381/>

## PLAGIARISME ADALAH PELANGGARAN HAK CIPTA DAN ETIKA

- Mahmudi. 2019. Manajemen Kinerja Sektor Publik. Edisi Ketiga. Penerbit Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen Yayasan Keluarga Pahlawan Negara: Yogyakarta.  
<https://ejournal.ipdn.ac.id/JEKP/article/download/2806/1381/>
- Mailangkay, P. P. U., Murni, S., Rate, P. V, Kinerja, A., & Daerah, K. 2020. Analisis kinerja Keuangan Daerah Pemerintah Kota Bitung. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, Vol 8 No 3, hal: 278-285.  
<https://doi.org/10.35794/emba.v8i3.29937>
- Maulina, F., & Rhea. 2019. Analisis Rasio Keuangan Untuk Mengukur Kinerja Keuangan Pemerintah (Studi Kasus pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat). *Obis*, vol 2 No 1, Hal: 11-22.  
<https://scholar.google.co.id/citations?user=sxr7vtcAAAAJ&hl=id>
- Pasolo, fahrudin. 2015. The Tendency of Revenue and Levies Contributions to the PAD Jayapura before and after the law No. 28 of 2009. Vol. 6, No.4, pp. 47-51. *Journal of Social and Development Sciences*.  
<https://scholar.google.com/citations?user=5XRMAJQAAAAJ&hl=id> pada 15 Maret 2023
- Santoso, Eko. 2011. Efisiensi Dan Efektifitas Pengelolaan Keuangan Daerah Di Kabupaten Ngawi. Tesis Magister Ekonomi Dan Studi Pembangunan: Universitas Sebelas Maret, Surakarta.  
<https://scholar.google.co.id/citations?user=H9xjEuoAAAAJ&hl=en> pada 1 April 2023
- Saragih, F., & Siregar, I. A. 2020. Analisis Rasio Keuangan Dalam Menilai Kinerja Keuangan Daerah pemerintah Kota Tebing. *Seminar of Social Sciences Engineering & Humaniora*, Hal: 1-14.  
<http://jurnal.unprimdn.ac.id/index.php/jukep/citationstylelanguage/get/apa?submissionId=1401&publicationId=1281> pada 25 Februari 2023
- Siregar, A. (2020). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah (Studi Kasus: Pemerintah Kota Depok-Jawa Barat), Volume 9 No 1, Hal: 1-9.  
<https://jurnal.unpad.ac.id/justin/article/view/25712/13273> pada 15 April 2023
- Undang-undang Nomer 23. (2014).
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang otonomi daerah